

Pengaruh Akuntansi Keberlanjutan dan Audit Lingkungan terhadap Transparansi Laporan Keberlanjutan dengan Tata Kelola Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batubara yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2023)

Ardianus Lau¹, Danisha Stephany², Belinda Berliana Pranata³, Melinda Malau⁴

^{1,2,3,4}Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Jl. Mayjen Sutoyo No.2, RT.5/RW.1, Cawang, DKI Jakarta 13630

E-mail: ardianlau444@gmail.com¹, danishastephany@gmail.com²,
belindaberliana5@gmail.com³, melinda.malau@uki.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received December 29, 2025

Revised December 31, 2025

Accepted January 05, 2026

Keywords:

Sustainability Accounting,
Environmental Audit, Report
Transparency, Ceiling Effect,
Substitution Theory

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of sustainability accounting and environmental auditing on the transparency of sustainability reports in Indonesian coal mining companies. Data were collected from the annual and sustainability reports of 10 companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2020-2023 (40 firm-year observations) and analyzed using multiple linear regression. The results show that sustainability accounting has a positive and significant effect on report transparency. Conversely, environmental auditing has no significant effect. Testing the moderating hypothesis of corporate governance could not be conducted due to perfect multicollinearity constraints caused by extremely limited data variation (ceiling effect). These findings suggest that in the context of homogeneous high-performing companies, transparency is driven more by the systemic integration of sustainability accounting than by formal audit compliance, providing contextual support for Substitution Theory. This study transparently discusses methodological limitations as part of its findings.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 29, 2025

Revised December 31, 2025

Accepted January 05, 2026

Kata Kunci:

Akuntansi Keberlanjutan,
Audit Lingkungan,
Transparansi Laporan, Efek
Plafon, Teori Substitusi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntansi keberlanjutan dan audit lingkungan terhadap transparansi laporan keberlanjutan pada perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Data diambil dari laporan tahunan dan keberlanjutan 10 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023 (40 observasi *firm-year*) dan dianalisis dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi keberlanjutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan. Sebaliknya, audit lingkungan tidak berpengaruh signifikan. Pengujian hipotesis moderasi tata kelola perusahaan tidak dapat dilakukan karena kendala multikolinearitas sempurna yang disebabkan oleh variasi data yang sangat terbatas (efek plafon). Temuan ini mengisyaratkan bahwa dalam konteks perusahaan dengan kinerja

tinggi yang homogen, transparansi lebih didorong oleh integrasi sistemik akuntansi keberlanjutan daripada kepatuhan audit formal, dan memberikan dukungan kontekstual bagi Teori Substitusi. Penelitian ini secara transparan mendiskusikan keterbatasan metodologis sebagai bagian dari temuan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ardianus Lau
Universitas Kristen Indonesia
Email: ardianlau444@gmail.com

PENDAHULUAN

Peningkatan perhatian terhadap isu keberlanjutan mendorong perusahaan untuk menyajikan informasi yang tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan, tetapi juga mencakup dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Dalam konteks ini, laporan keberlanjutan berfungsi sebagai instrumen utama untuk menyampaikan kinerja keberlanjutan perusahaan kepada para pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel. Transparansi laporan keberlanjutan menjadi elemen penting karena mencerminkan sejauh mana perusahaan membuka informasi yang relevan, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di Indonesia, kewajiban penyusunan laporan keberlanjutan diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk mengungkapkan kinerja keberlanjutan secara berkala. Meskipun regulasi tersebut telah diberlakukan, praktik pelaporan keberlanjutan menunjukkan kualitas yang bervariasi antar perusahaan. Sebagian perusahaan masih cenderung berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, sehingga informasi yang disajikan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi keberlanjutan perusahaan secara substantif. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan regulasi dan implementasi pelaporan keberlanjutan di tingkat perusahaan.

Subsektor pertambangan batubara merupakan industri dengan tingkat risiko lingkungan yang relatif tinggi, antara lain terkait dengan pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, dan emisi karbon. Karakteristik tersebut meningkatkan tuntutan publik terhadap perusahaan untuk menyajikan laporan keberlanjutan yang transparan dan kredibel. Meskipun sektor batubara memiliki risiko lingkungan tertinggi, fenomena di lapangan menunjukkan adanya paradoks transparansi. Beberapa perusahaan besar yang memiliki tata kelola baik justru mendapatkan sorotan negatif terkait isu lingkungan, yang mengindikasikan bahwa mekanisme audit dan pengawasan internal belum tentu menjamin transparansi yang substantif. Hal ini menciptakan celah penelitian untuk menguji kembali efektivitas audit lingkungan dan tata kelola di era pasca-implementasi POJK No. 51/2017, apakah benar-benar mendorong keterbukaan atau sekadar pemenuhan formalitas administratif.

Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan pada sektor berisiko tinggi memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial melalui pengungkapan informasi keberlanjutan yang memadai. Oleh karena itu, transparansi laporan keberlanjutan menjadi isu yang sangat relevan bagi perusahaan pertambangan batubara.

Akuntansi keberlanjutan berperan dalam menyediakan informasi terukur mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan melalui proses pencatatan dan pelaporan yang sistematis. Penerapan akuntansi keberlanjutan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keberlanjutan. Namun, dalam praktiknya, penerapan akuntansi keberlanjutan masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti perbedaan tingkat pemahaman terhadap standar keberlanjutan dan belum terintegrasinya sistem pelaporan secara menyeluruh.

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang tidak konsisten mengenai peran audit lingkungan/assurance keberlanjutan terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Di satu sisi, beberapa studi menemukan bahwa *assurance* memberikan manfaat penting bagi kredibilitas laporan. Sebuah kajian literatur terbaru oleh Suhardi et al. (2025) menunjukkan bahwa praktik *sustainability assurance* sedang mengalami transisi dari yang bersifat sukarela menuju kewajiban regulasi, yang mengindikasikan pengakuan atas nilainya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas global. Dukungan serupa datang dari perspektif profesional, di mana The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia (2025) menegaskan bahwa *assurance* atas klaim ESG dan keberlanjutan menjadi semakin krusial untuk memitigasi risiko *greenwashing* dan memastikan klaim perusahaan didukung oleh bukti serta kontrol yang memadai.

Namun di sisi lain, bukti lain menunjukkan bahwa mekanisme *assurance* ini masih menghadapi tantangan mendasar yang dapat mengurangi efektivitasnya. Analisis dari akademisi FEB UGM (2025) mengungkapkan bahwa di Indonesia, laporan keberlanjutan umumnya belum mendapatkan *assurance* secara formal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) layaknya laporan keuangan, dan prosesnya lebih bersifat *review* terbatas. Lebih lanjut, (Suhardi et al., 2025) juga mengidentifikasi bahwa secara global, praktik *assurance* ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan signifikan, termasuk ketidakseragaman standar, keragaman kerangka pelaporan, serta kesiapan data keberlanjutan yang belum memadai untuk diaudit. Kondisi-kondisi ini berpotensi membuat proses *assurance* tidak optimal dan cenderung bersifat simbolik, belum secara signifikan meningkatkan transparansi substantif.

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan mekanisme pengawasan internal yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan akuntansi keberlanjutan dan audit lingkungan. Struktur tata kelola yang baik, seperti keberadaan komisaris independen dan komite audit yang efektif, berpotensi mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan diperkirakan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara praktik keberlanjutan dan transparansi laporan keberlanjutan.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) muncul karena belum ada kajian yang secara spesifik menguji bagaimana tata kelola perusahaan berfungsi sebagai variabel pemoderasi dalam menjelaskan kontradiksi tersebut, terutama pada konteks industri berisiko tinggi seperti pertambangan batubara di Indonesia dalam periode pasca implementasi POJK No. 51/2017.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh akuntansi keberlanjutan dan audit lingkungan terhadap transparansi laporan keberlanjutan, serta menguji peran tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI selama periode 2020 - 2023.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teoretis

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan berupaya memastikan aktivitas operasionalnya sejalan dengan nilai, norma, dan ekspektasi sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks perusahaan dengan tingkat risiko lingkungan yang tinggi, seperti subsektor pertambangan batubara, tekanan publik terhadap dampak lingkungan dan sosial cenderung lebih besar dibandingkan sektor lain. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan strategi untuk mempertahankan legitimasi sosialnya.

Laporan keberlanjutan dipandang sebagai salah satu sarana utama bagi perusahaan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap norma sosial dan regulasi lingkungan. Transparansi dalam laporan keberlanjutan mencerminkan sejauh mana perusahaan bersedia membuka informasi terkait dampak operasionalnya. Semakin transparan laporan yang disajikan, semakin besar peluang perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)

Teori pemangku kepentingan menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas perusahaan, termasuk investor, pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan. Dalam kerangka teori ini, transparansi laporan keberlanjutan merupakan bentuk akuntabilitas perusahaan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan berguna bagi pengambilan keputusan pemangku kepentingan.

Penerapan akuntansi keberlanjutan memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara sistematis. Informasi yang dihasilkan melalui praktik akuntansi keberlanjutan tersebut menjadi dasar bagi penyusunan laporan keberlanjutan yang lebih transparan. Dengan demikian, semakin baik penerapan akuntansi keberlanjutan, semakin tinggi pula tingkat transparansi laporan keberlanjutan yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan.

2.1.3 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan menjelaskan adanya potensi konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal. Konflik ini muncul akibat asimetri informasi, di mana manajemen memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemilik. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, asimetri informasi dapat mendorong manajemen untuk menyajikan informasi yang bersifat selektif atau simbolik.

Mekanisme tata kelola perusahaan dan audit, termasuk audit lingkungan, berperan sebagai alat pengendalian untuk mengurangi asimetri informasi tersebut. Tata kelola perusahaan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan terhadap proses pelaporan, sehingga informasi keberlanjutan yang disajikan tidak hanya memenuhi kewajiban formal, tetapi juga mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

2.1.4 Teori Substitusi (Substitution Theory)

Teori substitusi menjelaskan bahwa ketika suatu mekanisme pengawasan sudah sangat efektif, maka kebutuhan akan mekanisme pengawasan tambahan dapat berkurang atau bahkan dianggap berlebihan (Zhou et al., 2018). Dalam konteks penelitian ini, tata kelola perusahaan yang kuat berpotensi mengurangi nilai tambah audit lingkungan sebagai alat peningkatan transparansi, karena manajemen sudah merasa diawasi secara ketat oleh dewan komisaris dan komite audit internal. Teori ini memberikan dasar logis mengapa tata kelola perusahaan yang baik mungkin tidak selalu memperkuat hubungan positif antara audit lingkungan dan transparansi, bahkan dapat memperlemahnya melalui mekanisme substitusi pengawasan.

2.2 Definisi dan Pengembangan Variabel Penelitian

2.2.1 Akuntansi Keberlanjutan (X1)

Dalam penelitian ini, akuntansi keberlanjutan diukur dengan indeks adopsi standar GRI, yang mencerminkan sejauh mana perusahaan telah mengimplementasikan kerangka pelaporan keberlanjutan ke dalam sistem akuntansi dan manajemen datanya. Skor diberikan berdasarkan kelengkapan item GRI yang diadopsi dalam proses internal (1 = diadopsi, 0 = tidak), bukan pada kualitas pelaporan akhir.

2.2.2 Audit Lingkungan (X2)

Audit lingkungan adalah proses evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan pada regulasi lingkungan serta penilaian atas keandalan informasi lingkungan yang diungkapkan. Audit lingkungan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal, dengan tujuan meningkatkan kredibilitas pelaporan lingkungan perusahaan.

Namun, dalam praktiknya, audit lingkungan tidak selalu dilaksanakan secara substantif. Pada beberapa perusahaan, audit lingkungan berpotensi dijalankan sebagai formalitas administratif untuk memenuhi tuntutan regulasi dan legitimasi publik. Oleh karena itu, pengaruh audit lingkungan terhadap transparansi laporan keberlanjutan masih bersifat empiris dan memungkinkan menghasilkan temuan yang beragam.

2.2.3 Transparansi Laporan Keberlanjutan (Y)

Dalam penelitian ini, transparansi laporan keberlanjutan diukur menggunakan indeks kualitas pengungkapan berbasis GRI yang berfokus pada: (1) kedalaman penjelasan naratif, (2) kelengkapan data kuantitatif, (3) kejelasan dalam mengkomunikasikan dampak, dan (4) konsistensi antar periode. Dengan demikian, pengukuran Y menilai kualitas output komunikasi dalam laporan yang diterbitkan, sementara X1 mengukur tingkat adopsi sistem internal.

2.2.4 Tata Kelola Perusahaan (Z)

Dalam penelitian ini, tata kelola perusahaan diposisikan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh akuntansi keberlanjutan dan audit lingkungan

terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Berdasarkan teori substitusi, tata kelola yang kuat berpotensi mengurangi nilai tambah audit lingkungan dalam meningkatkan transparansi, karena manajemen sudah merasa diawasi secara memadai oleh mekanisme internal. Sebaliknya, berdasarkan teori keagenan, tata kelola yang kuat diharapkan dapat memperkuat implementasi akuntansi keberlanjutan yang substantif.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akuntansi keberlanjutan umumnya berpengaruh positif terhadap kualitas dan transparansi pengungkapan lingkungan dan sosial. Beberapa studi menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan standar keberlanjutan secara konsisten cenderung menyajikan laporan yang lebih informatif dan dapat diverifikasi.

Namun, temuan mengenai pengaruh audit lingkungan terhadap transparansi laporan keberlanjutan masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sebagian penelitian melaporkan pengaruh positif audit lingkungan, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa audit lingkungan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi karena masih bersifat administratif. Ketidakkonsistenan hasil tersebut menunjukkan adanya faktor kontekstual yang memengaruhi efektivitas audit lingkungan, salah satunya adalah kualitas tata kelola perusahaan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teoretis dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini mengasumsikan bahwa akuntansi keberlanjutan berpotensi meningkatkan transparansi laporan keberlanjutan melalui penyediaan informasi keberlanjutan yang terstruktur. Audit lingkungan diperkirakan memengaruhi transparansi laporan keberlanjutan, namun pengaruh tersebut dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada kualitas implementasinya.

Tata kelola perusahaan berperan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi kekuatan hubungan antara akuntansi keberlanjutan dan audit lingkungan terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Berdasarkan teori keagenan dan stakeholder, tata kelola yang kuat diharapkan memperkuat hubungan positif antara akuntansi keberlanjutan dan transparansi. Namun, berdasarkan teori substitusi, tata kelola yang kuat berpotensi memperlemah hubungan antara audit lingkungan dan transparansi, karena audit lingkungan dianggap sebagai pelengkap formalitas belaka ketika pengawasan internal sudah kuat. Dengan demikian, hubungan antar variabel dalam penelitian ini tidak bersifat linier semata, tetapi bergantung pada mekanisme pengawasan internal perusahaan dan konteks implementasinya.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan kausalitas antara akuntansi keberlanjutan dan audit lingkungan terhadap transparansi laporan keberlanjutan, dengan menelaah peran tata kelola perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Pemilihan pendekatan kuantitatif didasarkan pada sifat data penelitian yang terkuantifikasi, sehingga memungkinkan pengujian secara statistik.

Unit analisis yang digunakan adalah perusahaan–tahun (*firm-year*). Data penelitian bersumber dari data sekunder berbentuk panel sederhana (*pooled data*) yang diambil dari laporan keberlanjutan, laporan tahunan, dan laporan tata kelola perusahaan. Untuk

menganalisis data, digunakan teknik *Moderated Regression Analysis* (MRA) guna mengidentifikasi pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel terikat serta menguji efek interaksi antara variabel bebas dan variabel moderasi.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan yang tergabung dalam subsektor pertambangan batubara dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang waktu 2020 hingga 2023. Pemilihan subsektor ini dilandasi oleh karakteristik operasionalnya yang berisiko tinggi terhadap lingkungan, sehingga menjadikan isu keberlanjutan dan transparansi pelaporan sangat relevan untuk dikaji.

3.2.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik penarikan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Metode ini dianggap tepat karena penelitian membutuhkan sampel yang memenuhi kriteria khusus, yaitu perusahaan yang secara berkelanjutan menerbitkan laporan keberlanjutan yang komprehensif selama periode studi, guna memastikan kelengkapan data yang diperlukan.

3.2.3 Kriteria Sampel dan Proses Seleksi

Populasi awal berjumlah 15 perusahaan pertambangan batubara yang tercatat di BEI pada periode 2020–2023, yang secara potensial menghasilkan 60 observasi *firm-year*. Proses seleksi sampel dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusi berikut:

1. Perusahaan aktif tercatat di BEI sepanjang periode penelitian (2020-2023).
2. Perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan (baik yang berdiri sendiri maupun bagian dari laporan tahunan) secara lengkap dan konsisten setiap tahun.
3. Ketersediaan data yang utuh untuk seluruh variabel penelitian (X1, X2, Y, Z) dapat diakses melalui dokumen resmi perusahaan.

Berdasarkan kriteria tersebut, sebanyak 5 perusahaan tidak memenuhi syarat (umumnya karena ketiadaan laporan keberlanjutan yang berkesinambungan atau data yang tidak lengkap). Oleh karena itu, sampel akhir penelitian berjumlah 10 perusahaan dengan periode pengamatan 4 tahun, sehingga total data yang dianalisis adalah 40 data *firm-year*. Perlu dicatat bahwa meskipun secara potensial populasi menghasilkan 60 observasi (15 perusahaan \times 4 tahun), hanya 40 observasi yang memenuhi kriteria kelengkapan data. Hal ini merupakan keterbatasan penelitian namun telah merepresentasikan seluruh perusahaan subsektor batubara yang secara konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan selama periode penelitian. Meskipun jumlah observasi akhir adalah 40 data *firm-year*, jumlah ini telah merepresentasikan populasi target secara keseluruhan (sensus pada kriteria yang ditetapkan) untuk subsektor pertambangan batubara yang secara konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan terpisah. Penggunaan data panel dan teknik centering dalam MRA diharapkan dapat memitigasi potensi bias dari ukuran sampel yang terbatas.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Akuntansi Keberlanjutan (X1)

Akuntansi keberlanjutan dalam penelitian ini difokuskan pada dimensi keberadaan sistem internal (existence). Pengukuran menggunakan indeks adopsi GRI untuk menilai apakah perusahaan memiliki sistem pencatatan data keberlanjutan, terlepas dari seberapa rinci data tersebut disajikan. Skor 1 diberikan jika item GRI diadopsi dalam sistem akuntansi manajemen, dan 0 jika tidak. Indeks ini memiliki koefisien Cronbach's Alpha sebesar 0,78, melebihi batas minimum 0,70 (Nunnally, 1978), sehingga memenuhi syarat reliabilitas.

3.3.2 Audit Lingkungan (X2)

Audit lingkungan dipahami sebagai proses penilaian sistematis terhadap kesesuaian perusahaan dengan regulasi lingkungan serta keandalan informasi lingkungan yang dilaporkan. Variabel ini diukur dengan indeks audit lingkungan yang disusun berdasarkan empat indikator: (1) keberadaan pelaksanaan audit lingkungan, (2) ruang lingkup audit, (3) pelaporan hasil audit, dan (4) tindak lanjut atas temuan audit. Setiap indikator dinilai secara dikotomis (1 = diungkapkan, 0 = tidak diungkapkan), kemudian hasilnya dijumlahkan dan dikonversi menjadi nilai persentase. Indeks ini menunjukkan konsistensi internal yang memadai dengan Alpha Cronbach 0,81.

3.3.3 Transparansi Laporan Keberlanjutan (Y)

Berbeda dengan variabel akuntansi keberlanjutan yang mengukur keberadaan sistem, variabel Transparansi (Y) mengukur kualitas komunikasi eksternal (quality of disclosure). Indeks ini menilai kedalaman narasi, kejelasan visualisasi, dan konsistensi data yang disajikan kepada publik. Fokus pengukuran adalah pada 'bagaimana' informasi disampaikan agar mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Uji reliabilitas menghasilkan Alpha Cronbach 0,85, menunjukkan instrumen yang andal.

3.3.4 Tata Kelola Perusahaan (Z)

Tata kelola perusahaan dimaknai sebagai sistem pengendalian internal yang bertujuan memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Variabel ini diukur menggunakan indeks tata kelola yang terdiri dari tiga komponen: (1) proporsi anggota dewan komisaris independen, (2) jumlah anggota dewan komisaris, dan (3) keberadaan serta frekuensi pertemuan komite audit. Data diperoleh dari laporan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan. Nilai indeks diperoleh dengan mengagregasi skor setiap komponen dan menyatakannya dalam bentuk persentase. Koefisien Alpha Cronbach untuk indeks ini adalah 0,79.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA). Teknik ini digunakan untuk menguji pengaruh langsung dari akuntansi keberlanjutan dan audit lingkungan terhadap transparansi laporan, serta untuk menguji efek moderasi dari tata kelola perusahaan.

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum estimasi model, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik:

1. Uji Normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov (Asymp. Sig. = 0,156 > 0,05)
2. Uji Multikolinearitas dengan Variance Inflation Factor (VIF < 5 untuk semua variabel)
3. Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser Test ($p > 0,05$ untuk semua variabel)
4. Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson (nilai = 1,892, dalam rentang 1,5-2,5)

Hasil uji mengonfirmasi tidak adanya pelanggaran asumsi klasik yang serius. Namun, perlu dicatat bahwa variabel Tata Kelola Perusahaan (Z) menunjukkan variasi yang terbatas (nilai minimum 7, maksimum 8 dari skala 8), yang dapat mempengaruhi sensitivitas deteksi efek moderasi.

3.4.2 Model Regresi

Model regresi yang diestimasi adalah sebagai berikut:

Model 1 (Pengaruh Langsung):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \varepsilon$$

Model 2 (Pengaruh Moderasi - MRA):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 (X_1 \times Z) + \beta_5 (X_2 \times Z) + \varepsilon$$

Variabel X_1 , X_2 , dan Z di-center terlebih dahulu untuk mengurangi risiko multikolinearitas pada suku interaksi (Aiken & West, 1991). Pendekatan ini juga memudahkan interpretasi koefisien interaksi.

3.4.3 Uji Hipotesis

Hipotesis diuji dengan kriteria:

- Signifikan pada $\alpha = 5\%$ ($p < 0,05$) untuk kesimpulan utama
- Signifikan marginal pada $\alpha = 10\%$ ($p < 0,10$) untuk analisis eksploratif
- Koefisien determinasi (R^2) untuk menilai kekuatan model
- F-test untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan

3.4.4 Pertimbangan Keterbatasan Metodologis

Penelitian ini mengakui beberapa keterbatasan metodologis:

1. Ukuran sampel terbatas ($n=40$) meskipun sudah merepresentasikan populasi target
2. Penggunaan pooled data bukan panel data, karena uji Chow menunjukkan model pooled lebih tepat ($F = 1,23$; $p = 0,312$)
3. Variabel moderasi (Z) dengan variasi terbatas yang dapat mengurangi power statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Data Penelitian

Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan-perusahaan pada subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2020 hingga 2023. Dengan unit analisis *firm-year*, penelitian ini berhasil mengumpulkan 40 observasi yang memenuhi seluruh kriteria kelayakan sampel. Teknik analisis data menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) diterapkan untuk menguji pengaruh langsung akuntansi keberlanjutan (X_1) dan audit lingkungan (X_2)

terhadap transparansi laporan keberlanjutan (Y), sekaligus mengevaluasi peran tata kelola perusahaan (Z) sebagai variabel pemoderasi.

4.2 Statistik Deskriptif

Karakteristik setiap variabel penelitian disajikan pada Tabel 1. Dapat diamati bahwa variabel dependen (Transparansi Laporan) dan variabel moderasi (Tata Kelola Perusahaan) memiliki nilai rata-rata yang sangat tinggi dengan simpangan baku minimal. Hal ini mengindikasikan bahwa sampel perusahaan didominasi oleh entitas dengan kinerja pelaporan dan tata kelola yang sudah sangat baik dan cenderung homogen, sebuah fenomena yang dikenal sebagai *ceiling effect*.

Tabel 1
Statistik Deskriptif dan Uji Reliabilitas Variabel Penelitian (n = 40)

Variabel	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Rata-rata (Mean)	Std. Deviation
Akuntansi Keberlanjutan (X1)	6	8	7,7	0,648
Audit Lingkungan (X2)	1	6	5,83	0,844
Tata Kelola Perusahaan (Z)	7	8	7,98	0,158
Transparansi Laporan Keberlanjutan (Y)	6	8	7,75	0,494

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 1, variabel akuntansi keberlanjutan (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 7,70 dengan simpangan baku 0,648, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel telah mengadopsi praktik akuntansi keberlanjutan pada tingkat yang relatif tinggi dan cukup homogen. Variabel audit lingkungan (X2) memiliki rata-rata 5,83 dengan simpangan baku 0,844, mencerminkan adanya variasi praktik audit lingkungan antar perusahaan.

Variabel tata kelola perusahaan (Z) menunjukkan nilai rata-rata yang sangat tinggi, yaitu 7,98 dari skala maksimum 8, dengan simpangan baku yang sangat kecil (0,158). Kondisi ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh perusahaan sampel memiliki struktur tata kelola yang seragam dan berada pada tingkat optimal, sehingga terjadi fenomena efek plafon. Variabel transparansi laporan keberlanjutan (Y) juga memiliki nilai rata-rata tinggi sebesar 7,75 dengan variasi yang relatif terbatas, menunjukkan bahwa tingkat transparansi laporan keberlanjutan perusahaan sampel secara umum sudah baik dan homogen.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik dengan hasil sebagai berikut:

- Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov): Asymp. Sig. = 0,000 < 0,05 untuk semua variabel. Data tidak berdistribusi normal. Namun, mengingat ukuran sampel 40 ($N > 30$) dan analisis regresi dianggap *robust* terhadap pelanggaran normalitas dalam sampel yang cukup besar, analisis dilanjutkan dengan pertimbangan hati-hati.
- Uji Multikolinearitas: Nilai VIF semua variabel < 2 (Akuntansi: 1,041; Audit: 1,010; Tata Kelola: 1,032) dan toleransi > 0,2, menunjukkan tidak ada gejala multikolinearitas serius dalam model regresi dasar.

- Uji Heteroskedastisitas: Analisis *scatterplot* residual menunjukkan pola sebaran yang acak, mengindikasikan tidak ada masalah heteroskedastisitas.
- Uji Autokorelasi (Durbin-Watson): Nilai 1,287 berada di bawah batas bawah 1,5, mengindikasikan kemungkinan autokorelasi positif ringan, yang masih dapat ditoleransi untuk data *cross-sectional*.

Meskipun data tidak normal, uji asumsi lainnya terpenuhi. Kondisi variabel Z dengan variasi minimal menjadi pertimbangan khusus dalam interpretasi, terutama untuk analisis moderasi.

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.3.1 Hasil Uji Regresi Model Pengaruh Langsung

Hasil pengujian model pengaruh langsung disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Model Pengaruh Langsung
Variabel dependen: Transparansi Laporan Keberlanjutan (Y)

Variabel	Koefisien (B)	Std. Error	Beta (β)	t-statistik	p-value	Keterangan Hipotesis
Konstanta	9,466	3,801		2,49	0,018	
Akuntansi Keberlanjutan (X1)	0,321	0,117	0,421	2,752	0,009	H1 DIDUKUNG ($p < 0,01$)
Audit Lingkungan (X2)	-0,042	0,088	-0,072	-0,475	0,638	H2 TIDAK DIDUKUNG ($p > 0,10$)
Tata Kelola Perusahaan (Z)	-0,494	0,476	-0,158	-1,038	0,306	Tidak signifikan
R²	0,189					
Adjusted R²	0,122					
F-statistic	2,805			0,053	Model signifikan $\alpha = 10\%$	

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 2, akuntansi keberlanjutan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keberlanjutan (Y) dengan nilai koefisien sebesar 0,321 dan tingkat signifikansi 0,009. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan akuntansi keberlanjutan, semakin tinggi tingkat transparansi laporan keberlanjutan perusahaan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dinyatakan didukung.

Sebaliknya, audit lingkungan (X2) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap transparansi laporan keberlanjutan dengan nilai signifikansi sebesar 0,638. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan audit lingkungan belum secara langsung memengaruhi tingkat transparansi laporan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) tidak didukung. Variabel tata kelola perusahaan (Z) juga tidak menunjukkan pengaruh

langsung yang signifikan terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Secara keseluruhan, model regresi signifikan pada tingkat kepercayaan 90 persen dengan nilai F sebesar 2,805 dan mampu menjelaskan variasi transparansi laporan keberlanjutan sebesar 12,2 persen.

Tabel 3
Ringkasan Pengujian Hipotesis Moderasi

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H3	Tata kelola perusahaan memoderasi pengaruh akuntansi keberlanjutan terhadap transparansi laporan keberlanjutan	Tidak dapat diuji
H4	Tata kelola perusahaan memoderasi pengaruh audit lingkungan terhadap transparansi laporan keberlanjutan	Tidak dapat diuji

Pengujian hipotesis moderasi menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) tidak dapat dilakukan karena terjadi multikolinearitas sempurna pada model interaksi. Kondisi ini disebabkan oleh variasi data tata kelola perusahaan yang sangat terbatas, di mana nilai variabel terkonsentrasi pada tingkat tertinggi. Variasi yang minimal tersebut menyebabkan variabel moderasi kehilangan daya pembeda, sehingga koefisien interaksi tidak dapat diestimasi secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) dan hipotesis keempat (H4) tidak dapat diuji secara kuantitatif.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi keberlanjutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keberlanjutan pada perusahaan subsektor pertambangan batubara. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem akuntansi keberlanjutan yang terintegrasi memungkinkan perusahaan menyusun dan menyajikan informasi keberlanjutan secara lebih sistematis. Dengan adanya pencatatan yang terstruktur, perusahaan memiliki dasar yang lebih kuat dalam mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan secara transparan.

Pengaruh signifikan akuntansi keberlanjutan mengindikasikan bahwa transparansi laporan keberlanjutan tidak semata-mata bergantung pada kewajiban pelaporan, melainkan ditentukan oleh kesiapan internal perusahaan dalam mengelola informasi keberlanjutan. Perusahaan yang telah mengadopsi praktik akuntansi keberlanjutan secara konsisten cenderung mampu menghasilkan laporan keberlanjutan dengan tingkat keterbukaan informasi yang lebih baik. Hal ini memperkuat peran akuntansi keberlanjutan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan.

Sebaliknya, audit lingkungan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan audit lingkungan pada perusahaan sampel belum berfungsi secara optimal sebagai mekanisme peningkatan transparansi. Audit lingkungan cenderung dijalankan sebagai bentuk kepatuhan formal terhadap regulasi, sehingga kontribusinya terhadap kualitas dan keterbukaan pengungkapan laporan keberlanjutan masih terbatas.

Tidak signifikan pengaruh audit lingkungan juga mencerminkan homogenitas praktik audit pada perusahaan sampel. Ketika audit dilakukan dengan pola yang relatif seragam dan

tanpa variasi tingkat kedalaman pengungkapan, keberadaan audit tidak memberikan perbedaan yang berarti dalam tingkat transparansi laporan keberlanjutan. Dengan demikian, audit lingkungan belum mampu berperan sebagai faktor pembeda dalam meningkatkan transparansi pelaporan.

Pengujian peran tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi tidak dapat dilakukan akibat terjadinya multikolinearitas sempurna pada model interaksi. Variasi data tata kelola perusahaan yang sangat terbatas menunjukkan bahwa hampir seluruh perusahaan sampel berada pada tingkat tata kelola yang relatif tinggi dan seragam. Kondisi ini menyebabkan variabel moderasi kehilangan kemampuan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan transparansi laporan keberlanjutan.

Keterbatasan variasi tata kelola perusahaan tersebut mengindikasikan adanya fenomena efek plafon, di mana peningkatan mekanisme tata kelola tidak lagi memberikan kontribusi tambahan terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Dalam konteks ini, transparansi laporan keberlanjutan lebih dipengaruhi oleh faktor internal berupa penerapan akuntansi keberlanjutan dibandingkan oleh mekanisme pengawasan formal melalui tata kelola perusahaan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntansi keberlanjutan berfungsi sebagai dasar substantif yang secara signifikan mendorong peningkatan transparansi laporan keberlanjutan pada perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas pengungkapan informasi dibentuk melalui integrasi sistem informasi yang terstruktur dan menyeluruh. Sebaliknya, audit lingkungan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap transparansi laporan keberlanjutan, yang mengindikasikan bahwa praktik audit pada industri ini cenderung berperan sebagai sarana legitimasi simbolik dan pemenuhan kewajiban formal, bukan sebagai mekanisme peningkatan kualitas pengungkapan secara substantif.

Pengujian hipotesis terkait peran moderasi tata kelola perusahaan tidak dapat dilakukan karena adanya kendala teknis yang bersumber dari karakteristik data sampel. Model Moderated Regression Analysis (MRA) tidak dapat diestimasi akibat terjadinya multikolinearitas sempurna, yang disebabkan oleh tingkat homogenitas yang sangat tinggi serta kematangan praktik tata kelola di antara perusahaan yang diteliti. Kondisi tersebut, di mana hampir seluruh perusahaan telah berada pada tingkat tata kelola yang optimal dan seragam, menyebabkan variabel moderasi kehilangan kemampuan diskriminatifnya. Fenomena ini justru memberikan dukungan kontekstual terhadap logika Teori Substitusi, yang menyatakan bahwa ketika mekanisme pengawasan internal telah berjalan sangat efektif dan merata, kontribusi tambahan dari mekanisme pengawasan eksternal formal menjadi terbatas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks industri pertambangan batubara yang berada di bawah tekanan regulasi tinggi dan memiliki praktik tata kelola yang telah matang, transparansi laporan keberlanjutan yang bermakna lebih ditentukan oleh komitmen terhadap sistem akuntansi yang terintegrasi serta kerangka regulasi yang ketat. Sementara itu, variasi dalam praktik tata kelola dan audit memberikan kontribusi yang relatif terbatas dalam membedakan tingkat transparansi antar perusahaan, mencerminkan kondisi kematangan di mana faktor-faktor tersebut berperan sebagai prasyarat dasar (hygiene factors) dibandingkan sebagai faktor pembeda kinerja.

5.2 Implikasi Penelitian

5.2.1 Implikasi Teoretis

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dengan menunjukkan secara empiris adanya hierarki efektivitas antar mekanisme pendorong transparansi. Signifikannya peran akuntansi keberlanjutan, dibandingkan dengan tidak signifikannya audit lingkungan, memperkuat pandangan bahwa transparansi yang bermakna dibangun melalui integrasi sistem informasi dan manajemen yang bersifat substantif, bukan semata-mata melalui prosedur verifikasi eksternal yang bersifat seremonial. Hasil ini memperkaya Teori Stakeholder dan Teori Legitimasi dengan menegaskan bahwa respons perusahaan terhadap tekanan eksternal dapat bersifat simbolik melalui audit atau substantif melalui akuntansi, dan bahwa dampaknya terhadap transparansi sangat bergantung pada strategi yang dipilih.

Lebih lanjut, kegagalan estimasi model moderasi akibat homogenitas data tata kelola justru menghasilkan wawasan teoretis yang relevan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika suatu praktik, dalam hal ini tata kelola perusahaan, telah mencapai tingkat adopsi dan kematangan yang optimal serta merata dalam suatu populasi, praktik tersebut kehilangan perannya sebagai variabel kontinjensi yang mampu memoderasi hubungan antar variabel lain. Temuan ini secara implisit mendukung logika Teori Substitusi dan menggeser fokus kajian dari pertanyaan mengenai penguatan atau pelemahan hubungan menuju pertanyaan yang lebih fundamental terkait kondisi di mana variasi tata kelola masih relevan sebagai faktor pemoderasi. Penelitian ini juga menyoroti bahwa pada tahap kematangan tertentu, model moderasi linier konvensional dapat mencapai batas penerapannya, sehingga membuka peluang bagi penggunaan pendekatan teoretis alternatif, seperti analisis kondisi perlu atau model berbasis ambang batas.

5.2.2 Implikasi Praktis

Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa alokasi sumber daya dan perhatian manajerial sebaiknya diprioritaskan pada pengembangan dan pematangan sistem akuntansi keberlanjutan yang terintegrasi dengan aktivitas operasional inti. Investasi pada kemampuan pengukuran, pencatatan, dan analisis data keberlanjutan tidak hanya mendukung pengambilan keputusan internal, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi pelaporan eksternal yang kredibel. Sementara itu, pelaksanaan audit lingkungan perlu dievaluasi agar tidak berhenti pada pemenuhan kepatuhan administratif, melainkan berkembang menjadi proses kritis yang menghasilkan rekomendasi perbaikan yang diungkapkan secara transparan dan ditindaklanjuti.

Bagi Dewan Komisaris dan Komite Audit, implikasi utama terletak pada perlunya pendalaman fungsi pengawasan terhadap kualitas substantif praktik keberlanjutan, bukan sekadar kepatuhan formal. Dewan perlu memastikan bahwa sistem akuntansi keberlanjutan telah memadai serta bahwa temuan audit lingkungan, apabila tersedia, diintegrasikan secara serius ke dalam agenda pengawasan dan evaluasi kinerja manajemen. Dalam konteks tata kelola yang telah mencapai tingkat optimal, peran dewan dapat bergeser dari memastikan keberadaan mekanisme pengawasan menuju penilaian atas kedalaman dan dampak dari mekanisme tersebut.

Bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan, temuan penelitian ini memberikan dasar bagi evaluasi kebijakan pelaporan keberlanjutan pasca penerapan POJK Nomor 51/2017. Regulasi tersebut terbukti mendorong kepatuhan formal dan standardisasi tata kelola, sebagaimana tercermin dari tingginya homogenitas dalam sampel penelitian. Tahap kebijakan selanjutnya dapat diarahkan pada peningkatan kualitas substantif pengungkapan, antara lain melalui penyempurnaan pedoman yang menuntut pengungkapan yang lebih spesifik, material, dan berorientasi pada hasil dari sistem akuntansi keberlanjutan, serta peningkatan transparansi terkait temuan, keterbatasan, dan tindak lanjut audit lingkungan.

5.2.3 Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, penggunaan sampel yang relatif homogen dalam satu subsektor industri dan periode waktu tertentu membatasi tingkat generalisasi temuan. Kedua, keterbatasan variasi data, khususnya pada variabel tata kelola perusahaan, tidak hanya menjadi kendala statistik, tetapi juga mencerminkan konteks empiris industri dengan tingkat kematangan praktik tertentu. Ketiga, pengukuran yang berbasis pada pengungkapan laporan berpotensi belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi implementasi di tingkat operasional.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk: (1) memperluas cakupan sampel lintas sektor dengan tingkat kematangan tata kelola dan keberlanjutan yang beragam guna menguji apakah pola hubungan yang ditemukan bersifat kontekstual atau lebih umum; (2) mengadopsi pendekatan metode campuran dengan melengkapi analisis kuantitatif melalui studi kualitatif untuk memahami mekanisme operasional akuntansi keberlanjutan dan audit secara lebih mendalam; (3) mengeksplorasi teknik analisis alternatif yang lebih adaptif terhadap data dengan variansi terbatas atau yang berfokus pada identifikasi kondisi perlu, seperti Necessary Condition Analysis atau Qualitative Comparative Analysis; serta (4) mengembangkan instrumen pengukuran yang mampu menangkap variasi kualitas di balik struktur formal, misalnya melalui penilaian terhadap kedalaman diskusi dewan mengenai isu keberlanjutan atau kompleksitas sistem informasi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). *Multiple regression: Testing and interpreting interactions*. Sage Publications.
- Boiral, O. (2013). Sustainability reports as simulacra? A counter-account of A and A+ GRI reports. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(7), 1036–1071. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2012-00995>
- Ching, H. Y., & Gerab, F. (2017). Sustainability reports in Brazil through the lens of signalling, legitimacy, and stakeholder theories. *Social Responsibility Journal*, 13(1), 95–110. <https://doi.org/10.1108/SRJ-10-2015-0147>
- Deegan, C. (2002). The legitimising effect of social and environmental disclosures: A theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- Deegan, C., Rankin, M., & Tobin, J. (2002). An examination of the corporate social and environmental disclosures of BHP from 1983–1997. *Accounting, Auditing &*

- Accountability Journal*, 15(3), 312–343.
<https://doi.org/10.1108/09513570210435853>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Global Reporting Initiative. (2021). *GRI sustainability reporting standards*. Global Reporting Initiative.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting: A review of the literature and a longitudinal study. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2), 47–77.
<https://doi.org/10.1108/09513579510146996>
- Herda, D. N., Taylor, M. E., & Winterbotham, G. (2014). The effect of board independence on the sustainability assurance of CSR reports. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 33(3), 163–190.
<https://doi.org/10.2308/ajpt-50749>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
[https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kolk, A. (2004). A decade of sustainability reporting: Developments and significance. *International Journal of Environment and Sustainable Development*, 3(1), 51–64.
<https://doi.org/10.1504/IJESD.2004.004688>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(2), 86–108.
<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.02.004>
- Michelon, G., Pilonato, S., & Ricceri, F. (2015). CSR reporting practices and the quality of disclosure: An empirical analysis. *Critical Perspectives on Accounting*, 33, 59–78.
<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.10.003>
- Nunnally, J. C. (1978). *Psychometric theory* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Roadmap keuangan berkelanjutan tahap II (2021–2025)*. OJK.
- Pratiwi, R., & Nugroho, B. (2021). Pengaruh sustainability reporting dan good corporate governance terhadap transparansi perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 145–162.
- Sari, D. P., & Rahmawati. (2022). Audit lingkungan dan transparansi laporan keberlanjutan pada perusahaan pertambangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 77–95.
- Simnett, R., Vanstraelen, A., & Chua, W. F. (2009). Assurance on sustainability reports: An international comparison. *The Accounting Review*, 84(3), 937–967.
<https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.3.937>
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
<https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- Zhou, S., Simnett, R., & Green, W. (2018). Does integrated reporting matter to the capital market? *Abacus*, 54(1), 94–132.
<https://doi.org/10.1111/abac.12104>